



LAPORAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
	I.1. Latar Belakang
	I.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi
	I.3. Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan yang tercantum dalam Renja OPD
BAB II	PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA OPD
	II.1. Perbandingan antara Program dan Kegiatan dalam Renja OPD Tahun 2022 dan Renstra OPD Tahun 2019-2024.
BAB III	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA OPD
	III.1 Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang tercantum dalam Renja/Renstra OPD
	III.2. IKU OPD dan Target Capaian Kinerja Tahun 2021
BAB IV	KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT
	IV.1 Kendala yang Dihadapi
	IV.2 Saran Tindak Lanjut
BAB V	PENUTUP
	V.1 Kesimpulan
	V.2 Rekomendasi

Lampiran Laporan Triwulan III Tahun 2022 Renja OPD Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang diuraikan secara rinci dan terukur. Evaluasi hasil terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon atau Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Periode Pelaksanaan Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan

alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah dan didasarkan kepada Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam rancangan awal RKPD tahun 2022 agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

I.2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN EVALUASI

Landasan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 29);
24. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.48-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

I.3. TUJUAN, SASARAN , PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON

Maksud disusunnya Evaluasi Rencana Kerja Badan Keuangan Badan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 untuk Triwulan I adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 serta mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Tujuan Evaluasi Rencana Kerja ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				<i>Outcome (1) : Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan Renja SKPD yang Diselesaikan</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
				<i>Jumlah Dokumen Pra RKA, RKA Hantaran, RKA Persetujuan dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	

				<i>Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Peretujuan,RKAP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan</i>
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				<i>Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD yang diselesaikan</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
				<i>Jumlah Dokumen DPAP Parsial dan DPAP Reguler SKPD yang diselesaikan</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				<i>Jumlah laporan capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran serta triwulanan yang diselesaikan</i>
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD, LKIP, IKU Perkin, RKT, PMPRB, SPIP, Standar Pelayanan, dan SKM yang diselesaikan</i>
				<i>Jumlah Sertifikat ISO yang Diperoleh terhadap Jenis Pelayanan yang Dijaminkan</i>

				<i>Outcome (2) : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan</i>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				<i>Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan</i>
				<i>Outcome (3) :Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan</i>
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				<i>Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta LS-Gj yang telah terverifikasi</i>

				<i>Jumlah dokumen SPJ BP/BPP SKPD yang telah di sahkan</i>
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				<i>Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD (Neraca, LO, LPE dan BAR Validasi Akun) yang telah tervalidasi</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Diselesaikan</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang Diselesaikan</i>
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</i>
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

				<i>Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang telah diselesaikan</i>
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang</i>
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Jumlah dokumen laporan untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam triwulan/semester/tahun</i>
				<i>Outcome (4) : Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum</i>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibutuhkan</i>

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				<i>Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Perkantoran yang Tersedia</i>
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				<i>Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum rapat pegawai yang tersedia</i>
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				<i>Jumlah Barang Cetak yang Dibutuhkan</i>
				<i>Jumlah Penggandaan yang Dibutuhkan</i>
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				<i>Jumlah Penayangan Iklan di Media Masa/Elektronik</i>
				<i>Jumlah Surat Kabar/Koran yang Dibutuhkan</i>

			Penyediaan Bahan/Material	
				<i>Jumlah ATK yang tersedia</i>
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				<i>Jumlah jamuan tamu yang difasilitasi</i>
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				<i>Jumlah Jenis Dokumen yang Telah Dikelola dan Diarsipkan</i>
				<i>Outcome (5) : Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah jenis tagihan yang diselesaikan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik dan Siap Pakai
				Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Terpelihara dengan baik dan siap pakai
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Tenaga Keamanan/Sekuriti
				Jumlah Tenaga Kebersihan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>
				<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>
				<i>Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>
				<i>Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>
				<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>
				<i>Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Operasional atau Lapangan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>

				Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional atau Lapangan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun dan Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun dan Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun dan Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Outcome (1) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				<i>Jumlah dokumen KUA dan PPAS</i>
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	
				<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD</i>
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	
				<i>Jumlah Dokumen DPA SKPD/PPKD</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				<i>Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</i>

				Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
				Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
				Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
				Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD
				Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
				Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan
				Jumlah Peserta Pelatihan dan/atau Sosialisasi
				Jumlah Regulasi dan/atau Kebijakan yang Diterbitkan

			<i>Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah</i>	
			<i>Jumlah Tim Penyusun Standar Biaya Belanja Daerah</i>	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
				<i>Jumlah Dokumen potensi PAD, Bagi Hasil Provinsi dan dana Transfer</i>
				<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>
				<i>Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				<i>Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan APBD</i>

				<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Pedum APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan APBD</i>
				<i>Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah</i>
				<i>Jumlah Peserta Sosialisasi ASB</i>
		<i>Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD</i>	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				<i>Outcome (2) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS</i>

			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	
				Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD
				Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD Mendahului RKPA Perubahan Reguler
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	
				Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD
				Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Mendahului DPPA Perubahan Reguler
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
				Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
				Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD

				<i>Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang PerubahanPenjabaran APBD Mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</i>
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				<i>Outcome (3) : Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaranOut</i>
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>

			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				<i>Terkoordinasinya Pengelolaan Kas Daerah</i>
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
				<i>Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD</i>
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
				<i>Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang disajikan secara tepat waktu</i>
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				<i>Jumlah dokumen Pelaporan DAU, DAK, BOK, DID, DBH, Bantuan Provinsi</i>
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
				<i>Jumlah Cetak SP2D yang diselesaikan</i>

			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	
				<i>Jumlah Dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan SKPD</i>
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				<i>Outcome (4) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah</i>
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				<i>Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan pada SKPD</i>
				<i>Jumlah Update Data Gaji PNS Daerah</i>
		<i>Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP</i>	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

				<i>Outcome (5) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP</i>
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Laporan Kas Pemerintah daerah yang diselesaikan</i>
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	
				<i>Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan</i>
				<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi</i>
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				<i>Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah yang Diselesaikan</i>

			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen LKPD Unaudited dan Audited yang Diselesaikan</i>
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				<i>Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				<i>Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

				<i>Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>
				<i>Jumlah Jenis Software Pengembangan Aplikasi SIPKD yang Terintegrasi dan Handal</i>
	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	<i>Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya</i>	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				<i>Outcome (1) : Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar</i>
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>
			Penyusunan Standar Harga	
				<i>Jumlah Dokumen Standar Harga Tertinggi</i>
				<i>Jumlah Anggota Tim Penyusun Standar Harga Tertinggi</i>
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	

				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>
				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>
			Penyusunan KebijakanPengelolaan Barang Milik Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah</i>
				<i>Jumlah Dokumen Peraturan Bupati/Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah</i>
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				<i>Jumlah SKPD yang Melakukan Penatausahaan BMD Sesuai dengan Aturan</i>
				<i>Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikembangkan</i>
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang</i>

			Penilaian Barang Milik Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Hasil Proses Nilai Taksir/Appraisal Barang Milik Daerah yang Akan Dihapuskan, Dipindahtangankan dan atau Disewakan</i>
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan</i>
				<i>Jumlah dokumen penetapan status penggunaan BMD dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD</i>
				<i>Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD</i>
				<i>Jumlah dokumen pemusnahan BMD</i>
				<i>Jumlah dokumen penghapusan BMD</i>
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah setiap bulannya yang Diselesaikan</i>

			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				<i>Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah</i>
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>
				<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD</i>
		<i>Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi</i>	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				<i>Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar</i>

			Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Penyelesaian/Penuntutan Penggantian kepada Pihak yang Menyebabkan Kerugian Daerah
				Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diasuransikan
				Jumlah Gedung Bangunan Milik Daerah yang Diasuransikan
				Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Telah dan atau Sedang Proses Sertifikasi
				Jumlah Patok Batas yang Terpasang
				Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Milik Daerah
				Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Lunas Bayar SPPT PBB

				<i>Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Milik Daerah yang Telah Melakukan Daftar Ulang</i>
				<i>Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan</i>
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				<i>Jumlah Bidang Tanah yang Diusahakan/Disewakan</i>

B A B II

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM RENJA OPD

II.1. Perbandingan antara Program dan Kegiatan dalam Renja OPD Tahun 2022 dan Renstra OPD Tahun 2019-2024.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Program sesuai dengan Urusan Pemerintahan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Penetapan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan berdasarkan Urusan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Program merupakan pengelompokan pada kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada Perubahan RPJMD 2019-2024 ditetapkan program-program yang berkaitan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program kegiatan tersebut diatas dipergunakan menjadi Program Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan pada program adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pembangunan daerah.

B A B III

TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA OPD

III.1. Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Tercantum dalam Renja/Renstra OPD

Pengertian **capaian kinerja** adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sedangkan **Realisasi Anggaran** adalah laporan **yang** menggambarkan perbandingan antara **anggaran** pendapatan dan belanja dengan **realisasinya yang** menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan

A. Target dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja/Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan setelah bulan September. Hasil dari evaluasi menjadi acuan untuk realisasi penyerapan pada triwulan tahun berikutnya.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Namun dilakukan Pergeseran Anggaran antara lain :

1. Pergeseran I dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022;
2. Pergeseran II dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022;
3. Pergeseran III dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022;
4. Pergeseran IV dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 atas pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon ditunjang dengan anggaran belanja.

Pagu Belanja Tahun 2022 sebesar Rp.17.379.553.620,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp.10.413.986.599,00,00 atau 59,92% terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu program sebesar Rp.10.315.387.390,00 dan realisasi program sebesar Rp.6.390.256.735,00 atau 61,95%.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pagu program sebesar Rp.5.049.137.030,00 dan realisasi program sebesar Rp. 2.962.036.275,00 atau 58,66%
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pagu program sebesar Rp.2.015.029.200,00 dan realisasi program sebesar Rp.1.061.693.589,00 atau 52,69%.

Target dan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang menggambarkan kinerja dan anggaran defenitif dapat dilihat sesuai dengan tabel. 3.1.

B. Target dan Capaian Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2022

Adapun target dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Triwulan III Tahun 2022 atas pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon antara lain :

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	4		5		6		7
0.00.	NON BIDANG URUSAN									
0.00.01.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	518.522.690	82,23	334.584.947	82,23	334.584.947	SEKRETARIAT BKAD
			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	2.232.486.200	59,64	949.055.792	59,64	949.055.792	SEKRETARIAT BKAD

			Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKAD
			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	22.938.500	87,5	15.946.400	87,5	15.946.400	SEKRETARIAT BKAD

			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen-Non KumulatifMeningkat)	100	144.973.000	53,85	67.940.800	53,85	67.940.800	SEKRETARIAT BKAD
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	7.200.442.000	92,31	5.022.728.796	92,31	5.022.728.796	BADAN KEUANG DAN ASET DAERAH; SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	144.973.000	0	67.940.800	0	67.940.800	
0.00.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan Renja SKPD yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	9.184.000	4	9.126.200	4	9.126.200	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Hantaran, RKA Persetujuan, dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	3	7.806.800	1	2.760.200	1	2.760.200	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Persetujuan, RKAP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	6.844.800	3	4.707.600	3	4.707.600	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran serta triwulanan yang diselesaikan, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	40	5.000.000	29	3.824.000	29	3.824.000	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat ISO yang Diperoleh terhadap Jenis Pelayanan yang Dijaminkan, (Satuan: Sertifikat - Non Kumulatif)	1	15.150.000	0	43.999.800	0	43.999.800	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	4.694.500	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPAP Parsial dan DPAP Reguler SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	5.994.400	1	3.523.000	1	3.523.000	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Hantaran, RKA Persetujuan, dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	3	7.806.800	1	2.760.200	1	2.760.200	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Persetujuan, RKAP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	6.844.800	3	4.707.600	3	4.707.600	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	144.973.000	0	67.940.800	0	67.940.800	
0.00.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan Renja SKPD yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	9.184.000	4	9.126.200	4	9.126.200	SEKRETARIAT BKAD

			Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD, LKIP, IKU Perkin, RKT, PMPRB, SPIP, Standar Pelayanan, dan SKM yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	8	90.298.500	8		8		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	7.214.311.400	0	5.033.481.096	0	5.033.481.096	

0.00.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan, (Satuan: Pegawai- Non Kumulatif)	52	7.200.442.000	48	5.022.728.796	48	5.022.728.796	BADAN KEUANG DAN ASET DAERAH
0.00.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta LS-Gj yang telah terverifikasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	1.415.400	4	3.435.000	4	3.435.000	SEKRETARIAT BKAD

			Jumlah dokumen SPJ BP/BPP SKPD yang telah di sahkan, (Satuan: Dokummen - Non Kumulatif)	5	3.549.600	5		5		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.02.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD (Neraca, LO, LPE dan BAR Validasi Akun) yang telah tervalidasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	1.922.700	4	1.385.500	4	1.385.500	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	5.000.000	1	3.950.100	1	3.950.100	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	1.981.700	1	1.981.700	1	1.981.700	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	9.069.100	0	5.194.100	0	5.194.100	
0.00.01.2.03.01.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang telah diselesaikan, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	1	2.209.200	1	2.209.200	1	2.209.200	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.03.05.		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	2	2.489.900	1	1.814.900	1	1.814.900	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.03.06.		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam triwulan/semester/tahun, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	4.370.000	1	1.170.000	1	1.170.000	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	0	0	0	0	0	
0.00.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Disediakan, (Satuan: Stel - Non Kumulatif)	65	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Building Adaptive Capacity, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	1	518.522.690	0	334.584.947	0	334.584.947	

0.00.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibutuhkan, (Satuan: Jenis Alat Listrik - Kumulatif)	18	19.608.210	13	14.171.400	13	14.171.400	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan, (Satuan: Jenis Barang - Kumulatif)	9	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Perkantoran yang Tersedia, (Satuan: Jenis Peralatan Rumah Tangga- Kumulatif)	20	48.970.130	15	37.290.300	15	37.290.300	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum rapat pegawai yang tersedia, (Satuan: Jenis - Kumulatif)	2	10.960.000	2	6.260.000	2	6.260.000	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang Dibutuhkan, (Satuan: Rim - Kumulatif)	18	2.700.000	13	30.955.700	13	30.955.700	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Barang Cetak yang Dibutuhkan, (Satuan: Cetak - Kumulatif)	18	42.771.700	13		13		SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Koran yang Dibutuhkan, (Satuan: Surat Kabar/Koran - Non Kumulatif)	7	87.600.000	7	65.700.000	7	65.700.000	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Penayangan Iklan di Media Masa/Elektronik, (Satuan: Iklan - Non Kumulatif)	25	0	21		21		SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang Tersedia, (Satuan: Jenis - Kumulatif)	70	65.096.900	52	37.297.900	52	37.297.900	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan tamu yang difasilitasi, (Satuan: Orang/Tahun - Non Kumulatif)	220	10.345.000	175	6.545.000	175	6.545.000	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	60	115.808.250	45	48.039.647	45	48.039.647	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Dokumen yang Telah Dikelola dan Diarsipkan, (Satuan: Jenis - Non Kumulatif)	3	114.662.500	3	88.325.000	3	88.325.000	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (Satuan: BA)	1	0	0	0	0	0	
0.00.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat yang Disediakan, (Satuan: Unit Kendaraan - Non Kumulatif)	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKAD

			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang Disediakan, (Satuan: Unit Kendaraan- Non Kumulatif)	0	0	0		0		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	1	1.135.436.700	0	728.681.919	0	728.681.919	

0.00.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan yang diselesaikan, (Satuan: Jenis - Non Kumulatif)	3	312.565.200	3	197.083.824	3	197.083.824	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.08.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Terpelihara dengan baik dan siap pakai, (Satuan: Jenis Peralatan - Non Kumulatif)	11	304.541.500	11	336.104.630	11	336.104.630	SEKRETARIAT BKAD

			Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik dan Siap Pakai, (Satuan: Jenis Perlengkapan - Non Kumulatif)	33	127.230.000	23		23		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan/Sekuriti, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	3	195.550.000	3	195.493.465	3	195.493.465	SEKRETARIAT BKAD

			Jumlah Tenaga Kebersihan, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	4	195.550.000	3		3		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	1	1.097.049.500	0	220.373.873	0	220.373.873	

0.00.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	11	2.150.500	0	88.536.502	0	88.536.502	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	5	5.000.000	1		1		SEKRETARIAT BKAD

			Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai, (Satuan: Unit - Kumulatif)	11	38.940.000	8		8		SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai, (Satuan: Unit - Kumulatif)	5	85.400.000	4		4		SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	22	4.301.000	12	28.641.700	12	28.641.700	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	5	5.000.000	2		2		SEKRETARIAT BKAD

			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai, (Satuan: Unit - Kumulatif)	22	13.296.000	18		18		SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai, (Satuan: Unit - Kumulatif)	5	20.000.000	4		4		SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun dan Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati,(Satuan: Unit Bangunan - Non Kumulatif)	2	833.000.000	1	52.323.000	1	52.323.000	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun dan Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati, (Satuan: Unit Bangunan - Non Kumulatif)	1	89.962.000	1	50.872.671	1	50.872.671	SEKRETARIAT BKAD
5.02.	KEUANGAN									

5.02.02.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.211.020.840	38,89	491.025.598	38,89	491.025.598	BIDANG ANGGARAN
			Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.247.699.040	92,86	837.110.306	92,86	837.110.306	BIDANG ANGGARAN

			Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	877.467.500	72,1	556.551.361	72,1	556.551.361	BIDANG PERBENDAHARA
			Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.271.336.800	61,36	879.897.010	61,36	879.897.010	BIDANG PERBENDAHARA

			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	441.612.850	39,64	197.452.000	39,64	197.452.000	BIDANG ANGGARAN; BIDANG PERBENDAHARA
5.02.02.2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, (Satuan: BA)	1	2.761.158.430	0	1.408.750.904	0	1.408.750.904	

5.02.02.2.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	177.502.300	2	156.063.000	2	156.063.000	BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	225.995.700	2	202.876.700	2	202.876.700	BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.03.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	74	175.900.000	0	57.214.400	0	57.214.400	BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.04.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD mendahului RKPA Perubahan Reguler, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	104	1.150.000	104	43.852.600	104	43.852.600	BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	74	196.755.200	0		0		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.05.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	375	37.060.300	0	28.849.080	0	28.849.080	BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	375	179.950.100	0	83.619.850	0	83.619.850	BIDANG ANGGARAN
		Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Mendahului DPPA Perubahan Reguler, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	104	0	104		104		BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.07.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	50	6.006.000	50	92.546.756	50	92.546.756	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	0	0		0		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	50	35.374.340	0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	6.006.000	0		0		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	487.822.400	0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	50	19.345.000	50		50		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	6.006.000	0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	50	28.818.000	0		0		BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.08.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen-Kumulatif)	50	0	50	506.761.156	50	506.761.156	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	7.738.000	20		20		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	50	0	50		50		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	522.494.540	20		20		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen- Kumulatif)	50	0	50		50		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	15.016.000	20		20		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	16,5	20		20		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	50	95.580.000	50		50		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen-Kumulatif)	20	3.003.000	20		20		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.09.		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi dan/atau Kebijakan yang Diterbitkan, (Satuan: Regulasi/Kebijakan - Kumulatif)	1	0	0	152.489.062	0	152.489.062	BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	135.164.600	0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Pelatihan dan/atau Sosialisasi, (Satuan: Orang - Kumulatif)	150	0	0		0		BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.10.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen potensi PAD, Bagi Hasil Provinsi dan dana Transfer, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	6	7.722.200	6	3.863.300	6	3.863.300	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Rapat Pembahasan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	30	0	30		30		BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.11.		Koordinasi PerencanaanAnggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, (Satuan: Dokumen/CD -Kumulatif)	0		0	0		0	0		0	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Pelatihan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	0		0	0			0			BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.12.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Kegiatan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	0	0	0	0	0	0	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Rapat Pembahasan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	0	0	0		0		BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.13.		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan APBD, (Satuan: Dokumen- Kumulatif)	150	302.438.550	0	80.615.000	0	80.615.000	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Sosialisasi Pedum APBD, (Satuan: Orang - Kumulatif)	150	0	0		0		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	0	0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, (Satuan: Orang - Kumulatif)	45	0	45		45		BIDANG ANGGARAN

			Jumlah Peserta Sosialisasi ASB, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	106	0	106		106		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.02.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, (Satuan: BA)	1	1.016.641.800	0	673.388.361	0	673.388.361	

5.02.02.2.02.01.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkoordinasinya Pengelolaan Kas Daerah, (Satuan: Instansi - Kumulatif)	4	377.945.000	3	222.677.000	3	222.677.000	BIDANG PERBENDAHARA
5.02.02.2.02.03.		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	444	55.803.800	333	40.620.000	333	40.620.000	BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.02.04.		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang disajikan secara tepat waktu, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	2	65.987.500	1	26.327.500	1	26.327.500	BIDANG PERBENDAHARA
5.02.02.2.02.05.		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Pelaporan DAU, DAK, BOK, DID, DBH, Bantuan Provinsi, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	6	82.407.700	5	40.886.930	5	40.886.930	BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Piutang dan Utang Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	0	0	0	0	0	0	BIDANG PERBENDAHARA
5.02.02.2.02.09.		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	876	90.645.000	657	65.228.379	657	65.228.379	BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.02.11.		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan pada SKPD, (Satuan: Orang - Kumulatif)	222	0	0	116.837.000	0	116.837.000	BIDANG PERBENDAHARA
			Jumlah Update Data Gaji PNS Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	14	139.174.300	11		11		BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.03.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, (Satuan: BA)	1	1.271.336.800	0	879.897.010	0	879.897.010	
5.02.02.2.03.01.		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kas Pemerintah daerah yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	3	62.680.600	0	41.232.300	0	41.232.300	BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.03.02.		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	20	330.415.000	10	366.394.334	10	366.394.334	BIDANG PERBENDAHARA
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	876	56.491.200	657		657		BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.03.03.		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	40.070.500	2	40.070.500	2	40.070.500	BIDANG PERBENDAHARA
5.02.02.2.03.04.		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKPD Unaudited dan Audited yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	234.333.900	2	205.063.464	2	205.063.464	BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.03.05.		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	85	193.069.300	85	89.454.412	85	89.454.412	BIDANG PERBENDAHARA
5.02.02.2.03.08.		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	26.979.800	0	0	0	0	BIDANG PERBENDAHARA

5.02.02.2.03.09.		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, (Satuan: Dok - Kumulatif)	2	125.110.000	2	37.360.000	2	37.360.000	BIDANG PERBENDAHARA
5.02.02.2.03.10.		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	1.286.500	0	100.322.000	0	100.322.000	BIDANG PERBENDAHARA

5.02.03.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	716.247.850	22,83	229.488.564	22,83	229.488.564	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	1.210.830.300	50,1	832.205.025	50,1	832.205.025	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	87.951.050	0	0	0	0	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Satuan: BA)	1	2.015.029.200	0	1.061.693.589	0	1.061.693.589	

5.02.03.2.01.01.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah DokumenStandar Harga Tertinggi, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	210	62.394.300	210	129.859.300	210	129.859.300	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Anggota Tim Penyusun Standar Harga Tertinggi, (Satuan: Orang - Kumulatif)	50	91.523.100	50		50		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5.02.03.2.01.02.		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	73	0	0	0	0	0	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.03.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dan pengelola barang yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	74	72.911.200	74	67.735.400	74	67.735.400	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	74	0	74		74		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.04.		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	85	0	0	5.573.500	0	5.573.500	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah Dokumen Peraturan Bupati/Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	85	68.228.750	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.05.		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang, (Satuan: SKPD - Kumulatif)	74	201.492.850	55,53	102.992.304	55,53	102.992.304	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikembangkan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	1	30.584.000	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.06.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	74	71.022.650	0	25.923.400	0	25.923.400	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5.02.03.2.01.07.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyelesaian/Penuntutan Penggantian kepada Pihak yang Menyebabkan Kerugian Daerah, (Satuan: Objek/Kasus - Kumulatif)	83	42.203.700	38	167.558.277	38	167.558.277	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diasuransikan, (Satuan: Unit Kendaraan - Kumulatif)	58	173.089.050	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah Gedung Bangunan Milik Daerah yang Diasuransikan, (Satuan: Unit Bangunan - Kumulatif)	50	90.000.000	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Telah dan atau Sedang Proses Sertifikasi, (Satuan: Bidang Tanah - Kumulatif)	195	230.578.250	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			0		0	0	20	Jumlah Patok Batas yang Terpasang, (Satuan: Patok - Kumulatif)				
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			0		0	0	10	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Milik Daerah, (Satuan: Plang - Kumulatif)				

			Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Lunas Bayar SPPT PBB, (Satuan: Bidang Tanah - Kumulatif)	60	0	14		14		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Milik Daerah yang Telah Melakukan Daftar Ulang, (Satuan: Unit Kendaraan - Kumulatif)	60	0	50		50		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	73	96.480.000	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.08.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Proses Nilai Taksir/Appraisal Barang Milik Daerah yang Akan Dihapuskan, Dipindahtangankan dan atau Disewakan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	344.136.000	5	299.138.550	5	299.138.550	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5.02.03.2.01.09.		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah yang Diusahakan/Disewakan, (Satuan: Objek - Kumulatif)	13	83.896.850	9	61.930.287	9	61.930.287	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.10.		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	0	83.870.200	0	90.596.254	0	90.596.254	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah dokumen penetapan status penggunaan BMD dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	28.200.000	1		1		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	3.338.000	1		1		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah dokumen pemusnahan BMD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	0	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah dokumen penghapusan BMD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1	0	0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5.02.03.2.01.11.		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah setiap bulannya yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	153.129.250	1,53	110.386.317	1,53	110.386.317	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.12.		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Neraca Aset/Barang Daerah Semesteran dan Tahunan yang Diyakini Kewajarannya, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5.02.03.2.01.13.		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah, (Satuan: SKPD - Non Kumulatif)	0	87.951.050	0	0	0	0	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
------------------	--	---	--	---	------------	---	---	---	---	---

III.2. INDIKATOR OPD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA BKAD KABUPATEN CIREBON

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Triwulan III Tahun 2022 sesuai tabel 3.3.

Tabel 3.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN CAPAIAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Capaian Kinerja
			Rumus	Tipe	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	$\frac{\left[25\% \times \left(\frac{RIS}{TIS}\right)\right] + \left[25\% \times \left(\frac{RIS}{TIS}\right)\right] + \left[25\% \times \left(\frac{RIS}{TIS}\right)\right] + \left[25\% \times \left(\frac{RIS}{TIS}\right)\right]}{100\%}$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan dan Sistem AKIP SKPD		
		Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	$\frac{\left[100\% \times \left(\frac{RIS}{TIS}\right)\right]}{100\%}$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan dan Sistem AKIP SKPD		
4.1.1.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	$\frac{(Tgl. Kesepakatan KUA/PPAS + Tgl. Persetujuan RAPBD) \text{ Hari Kerja} - 60 \text{ Hari Kerja}}{60 \text{ Hari Kerja}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Nota Keuangan	100 Prosen	0 Prosen
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	$\frac{(Tgl. Kesepakatan KUA/PPAS - P + Tgl. Persetujuan RAPBD - P) \text{ Hari Kerja} - 30 \text{ Hari Kerja}}{30 \text{ Hari Kerja}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Nota Keuangan	100 Prosen	0 Prosen
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	$\frac{(Tgl. Berkas SP2D Lengkap dan Sah + Tgl. Penerbitan SP2D) \text{ Hari Kerja} - 2 \text{ Hari Kerja}}{2 \text{ Hari Kerja}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	SPP/SPM, SP2D dan Rekon LRA Belanja	100 Prosen	100 Prosen
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	$\frac{(Tgl. LHP BPK + Tgl. Persetujuan RAPBD P2APBD) \text{ Hari Kerja} - 60 \text{ Hari Kerja}}{60 \text{ Hari Kerja}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Prosen	100 Prosen

4.1.2.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Bidang Tanah yang Telah Bersertifikat dan Didaftarkan ke BPN}}{\text{Jumlah Bidang Tanah}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Kartu Inventaris Barang	69.9 Prosen	0 Prosen
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	$\frac{(\text{Tgl. LHP BPK} + \text{Tgl. Persetujuan RAPBD P2APBD}) \text{ Hari Kerja}}{60 \text{ Hari Kerja}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Kartu Inventaris Barang	100 Prosen	100 Prosen
4.2.	Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	$\left[\frac{100\% \times \frac{RIS}{TIS}}{100\%} \right]$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan dan Sistem AKIP SKPD		
4.2.1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	$\left(\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang Terisi}} \right) \times \text{Nilai Penimbang} \times 25$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan Hasil Survey IP/IKM	80.5 Poin	0 Poin

**B. INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH OPD DAN
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022**

Kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja dengan merealisasikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Badan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan Misi ke IV yaitu : **"Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"** dan Tujuannya yaitu: **"Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa"** serta Sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator Opini BPK Terhadap LKPD.

Tabel 3.4
INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

[illegible]

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI atas audit Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah 7 kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 yang akan dievaluasi pada Tahun 2023 dengan Target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

C. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

Kinerja Pembangunan Daerah yang melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon pada Perubahan RPJMD 2019-2024 sebagaimana pada table. 3.5.

Tabel 3.5
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2021	TARGET CAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2022	REALISASI CAPAIAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			
(IKK/IKU)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100 Prosen	0 Prosen	0 Prosen
(IKK/IKU)-Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	100 Prosen	100 Prosen	0 Prosen
(IKK/IKU)-Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
IKK/IKU)-Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
(IKK/IKU)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan			
(IKK/IKU)-Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	52,63 Prosen	69,90 Prosen	0 Prosen
(IKK/IKU)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			
(IKK/IKU)-Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	80 Poin	80.50 Poin	81.426 Poin

B A B IV

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

4.1. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Faktor Pendorong

- a. Telah terintegrasinya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam 1 (satu) aplikasi yaitu SIRAOS;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menjaminkan layanan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebanyak 14 (empat belas) layanan.

2. Faktor Penghambat

- a. Adanya pergantian Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan sehingga Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan baru dengan melakukan pergeseran anggaran. Hal ini mengakibatkan kegiatan lambat dilaksanakan;
- b. Dokumen kepemilikan awal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang/tidak lengkap sehingga dalam memenuhi target capaian pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang maksimal;
- c. Kurangnya tenaga lapangan di BPN berakibat terhambatnya capaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

4.2. Saran Tindak Lanjut

1. Agar kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon segera diproses dan dilaksanakan sehingga target kinerja dapat tercapai;
2. Untuk mengejar capaian kinerja, Pimpinan beserta pejabat lainnya sebaiknya melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan merealisasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dengan pihak desa/kelurahan dan SKPD untuk melakukan verifikasi ulang lagi di lapangan agar pencapaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

4. Penyerapan anggaran per subkegiatan harus segera dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah dibuat dan direncanakan sebelumnya dengan memperhatikan kinerja yang akan dicapai selama Triwulan IV Tahun 2022.

B A B V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon disusun sebagai dokumen evaluasi terhadap perencanaan Triwulan III Tahun 2022 yang meliputi gambaran komitmen unit kerja ketika telah menetapkan tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada satu tahun anggaran, sehingga unit kerja dan/atau Pimpinan dapat menilai apakah komitmen telah dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui permasalahan yang menjadi kendala dan segera melakukan langkah-langkah penyelesaiannya.

5.2. Rekomendasi

- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon merupakan acuan Pimpinan terhadap kemampuan unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah menjadi rencana definitif dan telah dianggarkan pada APBD/DPA Tahun Anggaran 2022.
- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon akan merupakan pertimbangan dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya.

Sumber, 30 September 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
PEMBINA
NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
Periode Pelaksanaan : Triwulan III Tahun 2022

Indikator dan target kinerja yang mengacu pada sasaran RKPd:

1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah 80.50 Poin
2. Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan 100 Prosen
3. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 100 Prosen

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Renja Thn Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisast Anggaran Renstra PD s.d Thn 2022 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%	15	
0.00.	NON BIDANG URUSAN																							
0.00.01.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	8.600.618.500	100	1.019.982.809	100	518.522.690	34.33	137.647.063	58.95	246.497.306	82.23	334.584.947	0	0	82.23	334.584.947	100	1.354.567.756	100	15.75	SEKRETARIAT BKAD
			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	25.488.807.875	80	968.878.416	100	2.232.486.200	25.25	173.085.654	48.86	514.662.788	59.64	949.055.792	0	0	59.64	949.055.792	80	1.917.934.208	80	7.52	SEKRETARIAT BKAD
			Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	281.000.000	100	31.050.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	31.050.000	100	11.05	SEKRETARIAT BKAD
			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	19.410.000.000	81.82	225.964.251	100	22.938.500	50	4.967.100	87.50	13.876.000	87.50	15.946.400	0	0	87.50	15.946.400	87.50	241.910.651	87.50	1.25	SEKRETARIAT BKAD

			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	965.000.000	100	146.746.150	100	144.973.000	18.44	13.369.500	30.94	45.054.400	53.85	67.940.800	0	0	53.85	67.940.800	100	214.686.950	100	22.25	SEKRETARIAT BKAD
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	26.206.072.000	100	6.882.107.191	100	7.200.442.000	92.31	663.625.638	92.31	3.155.001.576	92.31	5.022.728.796	0	0	92.31	5.022.728.796	100	11.904.835.987	100	45.43	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	265.000.000	1	29.670.400	1	144.973.000	0	13.369.500	0	45.054.400	0	67.940.800	0	0	0	67.940.800	0	214.686.950	0	81.01	
0.00.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan Renja SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	12	45.000.000	4	11.680.400	4	9.184.000	0	2.150.000	1	5.911.600	4	9.126.200	0	0	4	9.126.200	4	20.806.600	33.33	46.24	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Hantaran, RKA Persetujuan, dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	6	20.000.000	4	5.273.700	3	7.806.800	0	0	0	0	1	2.760.200	0	0	1	2.760.200	1	8.033.900	16.67	40.17	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Persetujuan, RKAP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	8	20.000.000	4	5.273.700	4	6.844.800	1	1.653.400	1	1.653.400	3	4.707.600	0	0	3	4.707.600	3	9.981.300	37.50	49.91	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	20.000.000	1	3.555.900	1	4.694.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.900	0	17.78	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPAP Parsial dan DPAP Reguler SKPD yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	20.000.000	2	3.886.700	2	5.994.400	1	2.332.700	1	2.332.700	1	3.523.000	0	0	1	3.523.000	1	7.409.700	25	37.05	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran serta triwulanan yang diselesaikan, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	40	10.000.000	0	0	40	5.000.000	9	588.000	19	2.942.000	29	3.824.000	0	0	29	3.824.000	29	3.824.000	72.50	38.24	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat ISO yang Diperoleh terhadap Jenis Pelayanan yang Dijamin, (Satuan: Sertifikat - Non Kumulatif)	1	100.000.000		0	1	15.150.000	0	6.645.400	0	32.214.700	0	43.999.800	0	0	0	43.999.800	0	43.999.800	0	44	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Dokumen LKPI/LPFD, LKIP, IKU Perkin, RKT, PMPRB, SPIP, Standar Pelayanan, dan SKM yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	8	30.000.000		0	8	90.298.500	4		8		8		0		8		8		100		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	25.150.572.000	1	6.884.547.891	1	7.214.311.400	0	668.187.738	0	3.163.953.476	0	5.033.481.096	0	0	0	5.033.481.096	0	11.932.016.087	0	47.44	
0.00.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulan, (Satuan: Pegawai - Non Kumulatif)	52	25.106.072.000	50	6.882.107.191	52	7.200.442.000	48	663.625.638	48	3.155.001.576	48	5.022.728.796	0	0	48	5.022.728.796	48	11.904.835.987	92.31	47.42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
0.00.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta LS-G yang telah terverifikasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	5.000.000		0	4	1.415.400	4	306.000	4	1.940.600	4	3.435.000	0	0	4	3.435.000	4	3.435.000	100	68.70	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah dokumen SPJ BP/BPP SKPD yang telah di sahkan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	5	5.000.000		0	5	3.549.600	5		5		5		0		5		5		100		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.02.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD (Neraca, LO, LPE dan BAR Validasi Akun) yang telah tervalidasi, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	4	5.000.000		0	4	1.922.700	4	306.000	4	1.079.500	4	1.385.500	0	0	4	1.385.500	4	1.385.500	100	27.71	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	10.000.000		0	1	5.000.000	1	3.950.100	1	3.950.100	1	3.950.100	0	0	1	3.950.100	1	3.950.100	100	39.50	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Non Kumulatif)	1	5.000.000		0	1	1.981.700	0	0	1	1.981.700	1	1.981.700	0	0	1	1.981.700	1	1.981.700	100	39.63	SEKRETARIAT BKAD

0.00.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	20.000.000	1	4.036.450	1	9.069.100	0	405.000	0	4.924.100	0	5.194.100	0	0	0	5.194.100	0	214.730.551	0	1073.65	
0.00.01.2.03.01.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang telah diselesaikan, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	2	5.000.000	1	1.081.850	1	2.209.200	0	0	1	2.209.200	1	2.209.200	0	0	1	2.209.200	1	3.291.050	50	65.82	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.03.05.		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	4	5.000.000	2	1.468.700	2	2.489.900	0	405.000	1	1.544.900	1	1.814.900	0	0	1	1.814.900	1	3.283.600	25	65.67	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.03.06.		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam triwulan/semester/tahun, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	10.000.000	2	1.485.900	2	4.370.000	0	0	1	1.170.000	1	1.170.000	0	0	1	1.170.000	1	2.655.900	25	26.56	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	700.000.000	1	17.077.500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.050.000	0	4.44		
0.00.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Disediakan, (Satuan: Stel - Non Kumulatif)	75	70.000.000	70	17.077.500	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.077.500	0	24.40	SEKRETARIAT BKAD	
0.00.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Building Adaptive Capacity, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	75	630.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BKAD	
0.00.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (Satuan: BA)	4	3.221.850.000	1	596.995.581	1	518.522.690	0	137.647.063	0	246.497.306	0	334.584.947	0	0	0	334.584.947	0	1.354.567.756	0	42.04	
0.00.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibutuhkan, (Satuan: Jenis Alat Listrik - Kumulatif)	50	82.750.000	17	25.965.900	18	19.608.210	4.50	4.755.000	9	10.290.900	13	14.171.400	0	0	13	14.171.400	13	40.137.300	26	48.50	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan, (Satuan: Jenis Barang - Kumulatif)	48	1.425.000.000	12	271.315.000	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.315.000	0	19.04	SEKRETARIAT BKAD	

[illegible]

			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang Disediakan, (Satuan: Unit Kendaraan - Non Kumulatif)	1	50.000.000		0	0	0	0		0		0		0		0		0		0	SEKRETARIAT BKAD	
0.00.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	3.263.000.000	1	249.191.438	1	1.135.436.700	0	122.283.862	0	350.110.821	0	728.681.919	0	0	0	728.681.919	0	1.304.586.284	0	39.98	
0.00.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan yang diselesaikan, (Satuan: Jenis - Non Kumulatif)	3	549.500.000		0	3	312.565.200	3	70.916.652	3	133.868.387	3	197.083.824	0	0	3	197.083.824	3	197.083.824	100	35.87	SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.08.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Terpelihara dengan baik dan siap pakai, (Satuan: Jenis Peralatan - Non Kumulatif)	11	363.000.000		0	11	304.541.500	6	51.367.210	8	119.524.420	11	336.104.630	0	0	11	336.104.630	11	336.104.630	100	92.59	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik dan Siap Pakai, (Satuan: Jenis Perlengkapan - Non Kumulatif)	33	121.000.000		0	33	127.230.000	23		23		23		0		23		23		69.70		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan/Sekuriti, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	6	365.000.000		0	3	195.550.000	0	0	3	96.718.014	3	195.493.465	0	0	3	195.493.465	3	195.493.465	50	53.56	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Tenaga Kebersihan, (Satuan: Orang - Non Kumulatif)	6	375.000.000		0	4	195.550.000	0		3		3		0		3		3		50		SEKRETARIAT BKAD
0.00.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (Satuan: BA)	4	7.005.287.500	1	150.198.556	1	1.097.049.500	0	50.801.792	0	164.551.967	0	220.373.873	0	0	0	220.373.873	0	613.347.924	0	8.76	
0.00.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	22	5.500.000	11	2.482.572	11	2.150.500	0	30.656.302	0	61.167.502	0	88.536.502	0	0	0	88.536.502	0	91.019.074	0	1654.89	SEKRETARIAT BKAD
			Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya, (Satuan: Unit - Kumulatif)	10	11.000.000	5	4.965.144	5	5.000.000	0		1		1		0		1		1		10		SEKRETARIAT BKAD

[illegible]

5.02.02.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	14.737.561.500	87.50	1.005.925.387	100	1.211.020.840	0	49.967.316	5.56	188.447.796	38.89	491.025.598	0	0	38.89	491.025.598	87.50	1.496.950.985	87.50	10.16	BIDANG ANGGARAN
			Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	12.941.750.000	100	1.181.263.346	100	1.247.699.040	15.93	241.051.726	21.43	507.191.566	92.86	837.110.306	0	0	92.86	837.110.306	100	2.018.373.652	100	15.60	BIDANG ANGGARAN
			Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	12.164.000.000	100	1.047.378.438	100	877.467.500	20.79	127.608.917	55.47	410.956.443	72.10	556.551.361	0	0	72.10	556.551.361	100	1.603.929.799	100	13.19	BIDANG PERBENDAHARAAN
			Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	8.429.924.000	100	479.264.892	100	1.271.336.800	6.82	65.553.500	31.82	727.903.381	61.36	879.897.010	0	0	61.36	879.897.010	100	1.359.161.902	100	16.12	BIDANG PERBENDAHARAAN
			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	3.704.000.000	100	888.033.003	100	441.612.850	1.79	42.002.400	12.50	79.780.900	39.64	197.452.000	0	0	39.64	197.452.000	100	1.085.485.003	100	29.31	BIDANG ANGGARAN; BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Berita Acam Revisi Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, (Satuan: BA)	4	15.562.374.000	1	2.510.437.733	1	2.761.158.430	0	292.373.942	0	696.994.262	0	1.408.750.904	0	0	0	1.408.750.904	0	4.004.041.500	0	25.73	
5.02.02.2.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	993.000.000	2	218.646.000	2	177.502.300	0	500.000	0	97.104.500	2	156.063.000	0	0	2	156.063.000	2	374.709.000	40	37.74	BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	5	1.075.750.000	2	207.412.020	2	225.995.700	0	500.000	0	1.200.000	2	202.876.700	0	0	2	202.876.700	2	410.288.720	40	38.14	BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.03.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	222	1.285.000.000	74	172.769.400	74	175.900.000	0	7.264.400	0	7.264.400	0	57.214.400	0	0	0	57.214.400	0	229.983.800	0	17.90	BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.04.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD mendahului RKPA Perubahan Reguler, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	312	905.000.000	104	108.014.355	104	1.150.000	90	22.870.100	104	36.599.200	104	43.852.600	0	0	104	43.852.600	104	151.866.955	33.33	16.78	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	222	905.000.000	74	108.014.355	74	196.755.200	0		0		0		0	0		0		0			BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.05.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1125	1.340.000.000	375	33.513.800	375	37.060.300	0	23.821.280	0	26.935.180	0	28.849.080	0	0	0	28.849.080	0	62.362.880	0	4.65	BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.01.06.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	750	900.000.000	375	64.188.341	375	179.950.100	0	54.151.550	0	70.847.050	0	83.619.850	0	0	0	83.619.850	0	147.808.191	0	16.42	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Mendahului DPPA Perubahan Reguler, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	208	900.000.000	104	64.188.341	104	0	90		104		104		0		104		104		50		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.07.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	793.000.000	50	74.783.806	50	6.006.000	0	5.332.036	0	7.895.216	50	92.546.756	0	0	50	92.546.756	50	167.330.562	33.33	21.10	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	60	105.000.000	20	37.391.903	20	0	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	255.000.000	50	93.479.757	50	35.374.340	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	60	105.000.000	20	37.391.903	20	6.006.000	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	60	105.000.000	20	37.391.903	20	487.822.400	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	216.000.000	50	74.783.806	50	19.345.000	0		0		50		0		50		50		33.33		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	60	105.000.000	20	37.391.903	20	6.006.000	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	230.000.000	50	74.783.806	50	28.818.000	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.08.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	150	1.068.250.000	50	109.189.601	50	0	0	163.530.076	0	398.545.316	50	506.761.156	0	0	50	506.761.156	50	615.950.757	33.33	57.66	BIDANG ANGGARAN

[illegible]

			Jumlah Peserta Pelatihan dan/atau Sosialisasi, (Satuan: Orang - Kumulatif)	373	105.000.000	150	25.647.408	150	0	0		0		0		0		0		0			BIDANG ANGGARAN	
			Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	106	132.000.000		0	106	88.293.700	0		0		106		0		106		106		100		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Tim Penyusun Standar Biaya Belanja Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	45	30.000.000		0	45	0	0		45		45		0		45		45		100		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.10.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen potensi PAD, Bagi Hasil Provinsi dan dana Transfer, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	30	155.000.000	6	3.007.924	6	7.722.200	0	0	0	1.997.700	6	3.863.300	0	0	6	3.863.300	6	6.871.224	20	4.43	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Rapat Pembahasan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	76	33.000.000	15	660.276	30	0	0		0		30		0		30		30		39.47		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.11.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, (Satuan: Dokumen/CD - Kumulatif)	258	579.624.000	4	2.237.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.237.450	0	0.39	BIDANG ANGGARAN	
			Jumlah Peserta Pelatihan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	410	35.000.000	80	827.550	0	0	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.12.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Kegiatan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	8	120.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Rapat Pembahasan, (Satuan: Orang - Kumulatif)	60	20.000.000		0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.13.		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	625	205.000.000	150	64.649.800	150	302.438.550	0	1.354.900	0	1.354.900	0	80.615.000	0	0	0	80.615.000	0	145.264.800	0	70.86	BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman APBD, (Satuan: Orang - Kumulatif)	625	205.000.000	150	64.649.800	150	0	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	355	205.000.000	150	64.649.800	150	0	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, (Satuan: Orang - Kumulatif)	143	209.000.000	45	64.649.800	45	0	0		0		45		0		45		45		31.47		BIDANG ANGGARAN
			Jumlah Peserta Sosialisasi ASB, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	212	200.000.000	106	64.649.800	106	0	0		0		106		0		106		106		50		BIDANG ANGGARAN

5.02.02.2.02.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. (Satuan: BA)	4	7.401.000.000	1	1.527.309.578	1	1.016.641.800	0	168.256.417	0	489.382.443	0	673.388.361	0	0	0	673.388.361	0	2.200.697.939	0	29.74	
5.02.02.2.02.01.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkoordinasinya Pengelolaan Kas Daerah. (Satuan: Instansi - Kumulatif)	12	1.669.000.000	4	142.765.370	4	377.945.000	0	48.374.000	2	186.129.000	3	222.677.000	0	0	3	222.677.000	3	365.442.370	25	21.90	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.03.		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	1332	702.000.000	444	186.488.800	444	55.803.800	111	9.320.000	222	26.864.000	333	40.620.000	0	0	333	40.620.000	333	227.108.800	25	32.35	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.04.		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang disajikan secara tepat waktu. (Satuan: Laporan - Kumulatif)	6	219.000.000	2	69.957.700	2	65.987.500	0	0	1	26.327.500	1	26.327.500	0	0	1	26.327.500	1	96.285.200	16.67	43.97	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.05.		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Pelaporan DAU, DAK, BOK, DID, DBH, Bantuan Provinsi. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	18	493.000.000	6	50.405.545	6	82.407.700	3	8.855.797	5	29.960.480	5	40.886.930	0	0	5	40.886.930	5	91.292.475	27.78	18.52	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.06.		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Cetak SP2D yang diselesaikan. (Satuan: Jenis - Kumulatif)	12	821.000.000	4	205.279.324	4	204.678.500	0.99	38.831.020	1.98	97.762.338	2.97	160.811.552	0	0	2.97	160.811.552	2.97	366.090.876	24.75	44.59	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan PFK. (Satuan: Jenis - Kumulatif)	9	402.000.000	3	53.576.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.576.851	0	13.33	BIDANG PERBENDAHARAAN	
5.02.02.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Piutang dan Utang Daerah. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	6	365.000.000	2	113.921.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.921.080	0	31.21	BIDANG PERBENDAHARAAN	
5.02.02.2.02.09.		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan SKPD. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2628	884.000.000	876	224.983.768	876	90.645.000	219	22.228.100	438	43.913.125	657	65.228.379	0	0	657	65.228.379	657	290.212.147	25	32.83	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.11.		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan pada SKPD. (Satuan: Orang - Kumulatif)	666	805.000.000	222	311.955.241	222	0	0	40.647.500	0	78.426.000	0	116.837.000	0	0	0	116.837.000	0	428.792.241	0	53.27	BIDANG PERBENDAHARAAN
			Jumlah Update Data Gaji PNS Daerah. (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	42	1.041.000.000	14	167.975.899	14	139.174.300	3		7		11	0		11		11		26.19			BIDANG PERBENDAHARAAN

5.02.02.2.03.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, (Satuan: BA)	4	3.031.924.000	1	479.264.892	1	1.271.336.800	0	65.553.500	0	727.903.381	0	879.897.010	0	0	0	879.897.010	0	2.247.800.482	0	74.14	
5.02.02.2.03.01.		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kas Pemerintah daerah yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	6	184.509.210		0	3	62.680.600	0	17.872.800	0	25.325.100	0	41.232.300	0	0	0	41.232.300	0	41.232.300	0	22.35	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.02.		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	40	421.000.000	20	156.295.164	20	330.415.000	0	38.267.300	10	359.032.817	10	366.394.334	0	0	10	366.394.334	10	522.689.498	25	124.15	BIDANG PERBENDAHARAAN
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	1752	222.156.400	876	36.661.828	876	56.491.200	219		438		657		0		657		657		37.50		BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.03.		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	147.462.820		0	2	40.070.500	0	0	0	0	2	40.070.500	0	0	2	40.070.500	2	40.070.500	50	27.17	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.04.		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKPD Unaudited dan Audited yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	399.000.000		30.397.200	2	234.333.900	1	8.380.900	2	193.723.464	2	205.063.464	0	0	2	205.063.464	2	235.460.664	50	59.01	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.05.		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	170	163.000.070	85	29.204.450	85	193.069.300	0	0	85	49.500.000	85	89.454.412	0	0	85	89.454.412	85	118.658.862	50	72.80	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.08.		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, (Satuan: Dok - Kumulatif)	2	147.383.350	1	27.443.500	1	26.979.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.443.500	0	18.62	BIDANG PERBENDAHARAAN	
5.02.02.2.03.09.		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	420.000.000	2	141.033.700	2	125.110.000	0	0	0	0	2	37.360.000	0	0	2	37.360.000	2	178.393.700	50	42.47	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.10.		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	414.412.150	2	27.573.370	2	1.286.500	0	1.032.500	0	100.322.000	0	100.322.000	0	0	0	100.322.000	0	127.895.370	0	30.86	BIDANG PERBENDAHARAAN

			Jumlah Jenis Software Pengembangan Aplikasi SIPKD yang Terintegrasi dan Handal, (Satuan: Jenis - Kumulatif)	4	205.000.000	2	1.451.230	2	200.900.000	0		1		1		0		1		1		25		BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.11.		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan yang disosialisasikan, (Satuan: Dok - Kumulatif)	4	124.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.03.	Meningkatnya penataan aset daerah sesuai peraturan perundangan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan dengan baik/benar, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	6.007.999.678	97.76	512.469.055	100	716.247.850	0	75.626.935	11.95	147.246.916	22.83	229.488.564	0	0	22.83	229.488.564	97.76	741.957.619	97.76	12.35	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	19.611.046.200	100	1.702.793.604	100	1.210.830.300	3.16	122.543.595	23.81	573.654.610	50.10	832.205.025	0	0	50.10	832.205.025	100	2.534.998.629	100	12.93	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	474.112.700	0	0	100	87.951.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Satuan: BA)	4	7.907.166.605	1	1.488.991.899	1	2.015.029.200	0	198.170.530	0	720.901.526	0	1.061.693.589	0	0	0	1.061.693.589	0	3.328.855.486	0	42.10	
5.02.03.2.01.01.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Tertinggi, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	630	543.000.000		0	210	62.394.300	0	22.962.700	0	100.372.200	210	129.859.300	0	0	210	129.859.300	210	129.859.300	33.33	23.92	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Anggota Tim Penyusun Standar Harga Tertinggi, (Satuan: Orang - Kumulatif)	150	60.000.000		0	50	91.523.100	0		50		50		0		50		50		33.33		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.02.		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	146	448.229.380	73	122.286.200	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.286.200	0	27.28	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
5.02.03.2.01.03.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dan pengelola barang yang diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	148	132.271.600	74	19.032.519	74	72.911.200	0	0	0	47.208.900	74	67.735.400	0	0	74	67.735.400	74	86.767.919	50	65.60	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	148	62.000.000	74	3.898.227	74	0	0		0		74		0		74		74		50		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.04.		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	170	210.000.000	85	36.607.350	85	0	0	0	0	0	0	5.573.500	0	0	0	5.573.500	0	42.180.850	0	20.09	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Dokumen Peraturan Bupati/Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	170	210.000.000	85	36.607.350	85	68.228.750	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.05.		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang, (Satuan: SKPD - Kumulatif)	148	420.304.000	74	164.572.242	74	201.492.850	18.51	27.038.806	37.02	50.681.930	55.53	102.992.304	0	0	55.53	102.992.304	55.53	267.564.546	37.52	63.66	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikembangkan, (Satuan: Paket - Kumulatif)	2	200.000.000	1	88.615.822	1	30.584.000	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.06.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	148	650.000.000	74	70.933.913	74	71.022.650	0	3.750.000	0	10.420.400	0	25.923.400	0	0	0	25.923.400	0	96.857.313	0	14.90	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.07.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyelesaian/Penuntutan Penggantian kepada Pihak yang Menyebabkan Kerugian Daerah, (Satuan: Objek/Kasus - Kumulatif)	166	118.850.550	83	23.063.094	83	42.203.700	0	51.655.762	13	101.284.536	38	167.558.277	0	0	38	167.558.277	38	190.621.371	22.89	160.39	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diasuransikan, (Satuan: Unit Kendaraan - Kumulatif)	116	439.000.000	58	134.534.716	58	173.089.050	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Gedung Bangunan Milik Daerah yang Diasuransikan, (Satuan: Unit Bangunan - Kumulatif)	100	300.000.000	50	49.970.037	50	90.000.000	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Telah dan atau Sedang Proses Sertifikasi, (Satuan: Bidang Tanah - Kumulatif)	320	400.000.000	97	103.783.924	195	230.578.250	0		0		0		0		0		0		0		BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

			Jumlah Patok Batas yang Terpasang, (Satuan: Patok - Kumulatif)	40	79.000.000	20	3.843.849	20	0	0		0		0		0		0		0			BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Milik Daerah, (Satuan: Plang - Kumulatif)	20	55.000.000	10	3.843.849	10	0	0		0		0		0		0		0			BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Lunas Bayar SPPT PBB, (Satuan: Bidang Tanah - Kumulatif)	120	235.000.000	60	49.970.037	60	0	0		10		14		0		14		14		11.67	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Milik Daerah yang Telah Melakukan Daftar Ulang, (Satuan: Unit Kendaraan - Kumulatif)	120	50.000.000	60	11.531.547	60	0	0		20		50		0		50		50		41.67	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	146	54.000.000	73	3.843.849	73	96.480.000	0		0		0		0		0		0		0	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
5.02.03.2.01.08.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Proses Nilai Taksir/Appraisal Barang Milik Daerah yang Akan Dihapuskan, Dipindahtangankan dan atau Disewakan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	10	1.000.000.000	5	364.595.068	5	344.136.000	0	1.906.000	4	208.382.650	5	299.138.550	0	0	5	299.138.550	5	663.733.618	50	66.37	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.09.		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah yang Diusahakan/Disewakan, (Satuan: Objek - Kumulatif)	26	282.443.898	13	46.072.728	13	83.896.850	0	23.971.173	7	45.962.380	9	61.930.287	0	0	9	61.930.287	9	108.003.015	34.62	38.24	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.10.		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	146	415.849.377	73	24.513.690	0	83.870.200	0	16.058.706	0	73.810.880	0	90.596.254	0	0	0	90.596.254	0	115.109.944	0	27.68	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Jumlah dokumen penetapan status penggunaan BMD dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	4	205.000.000	2	1.089.497	2	28.200.000	0		0		1		0		1		1		25	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD, (Satuan: Dokumen - Kumulatif)	2	105.000.000	1	1.089.497	1	3.338.000	0		1		1		0		1		1		50	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

[illegible]